



LAPORAN KINERJA

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026



<https://bpkad.sumselprov.go.id>



bpkad_provsumsel



bpkad2.sumselprov@gmail.com



(0711) 5736539

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



BPKAD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PerAKHLAK
Pelayanan Akuntabel Kompeten
Tiyak Adapi Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja BPKAD Triwulan II Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Di dalamnya tersaji analisis mengenai pencapaian indikator kinerja utama, realisasi anggaran, serta berbagai kendala maupun solusi strategis yang diambil selama Triwulan II.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kinerja di masa mendatang. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam pencapaian target kinerja periode ini.

Kami menyadari bahwa keberhasilan capaian di Triwulan II ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BPKAD dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan strategis untuk mencapai target kinerja yang lebih baik pada triwulan berikutnya.

Palembang, 6 Juli 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Struktur Organisasi	1
3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	
4. Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja.....	3
a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026	3
b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Per Triwulan	7
c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	10
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Penungkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	13
e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	18
f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	24
5. Realisasi Keuangan	32
6. Upaya Perbaikan terkait Perjanjian Kinerja pada masa yang akan datang	36
BAB III PENUTUP	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Organisasi BPKAD Prov. Sumsel	1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026.....	6
Tabel 2.2 LRA Triwulan II Tahun 2026.....	7
Tabel 2.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja per triwulan.....	9
Tabel 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah.....	12
Tabel 2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	17
Tabel 2.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	19
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan ...	20
Tabel 2.8 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan	28
Tabel 2.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	33

BAB I PENDAHULUAN

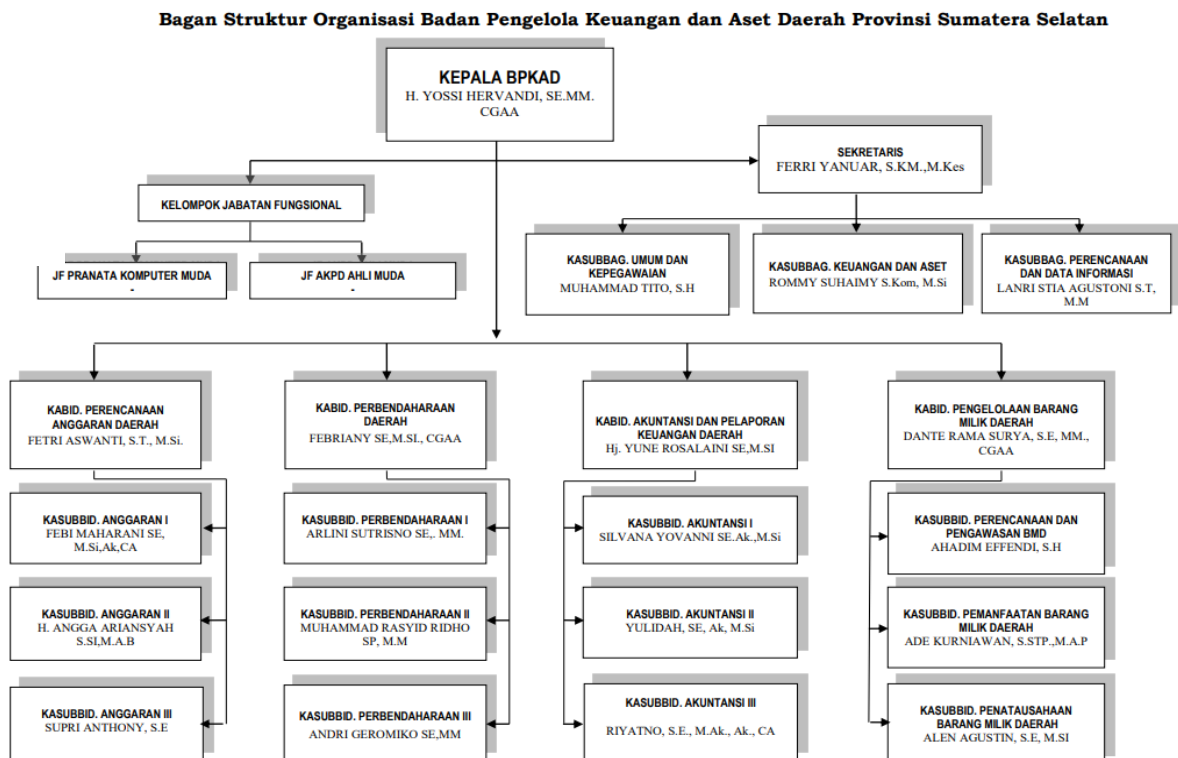
1. Latar Belakang

Laporan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Triwulan II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan transparan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai tolok ukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahunan. Triwulan II sangat penting untuk memetakan langkah strategis, mengidentifikasi hambatan awal, serta memastikan seluruh program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa serapan anggaran dan target kinerja fisik tercapai secara optimal sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan



3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja BPKAD Triwulan II Tahun 2026 adalah :

- a. Memberikan gambaran mengenai sejauh mana BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program BPKAD Provinsi Sumatera Selatan secara transparan, serta mengukur sejauh mana target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai di awal tahun anggaran.
- c. Sebagai dasar untuk mengambil langkah korektif sejauh mana target-target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan telah tercapai.

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

4. Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan representasi dari realisasi rencana aksi yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Adapun target dan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2026 akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator : Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan dengan target 100%

- Target dan realisasi Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027

Mengingat saat ini kita berada Triwulan II Tahun 2026, progres penyusunan APBD Perubahan Tahun 2026 masih dalam tahap evaluasi realisasi anggaran semester pertama (Januari-Juni). Pembahasan formal mengenai Perubahan APBD 2026 umumnya baru dimulai pada bulan Juli atau Agustus 2026 setelah Laporan Realisasi Semester II (LRA) disampaikan.

Sejalan dengan hal tersebut, proses penyusunan APBD Induk Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditargetkan paling lambat pada 30 November 2026, guna memastikan dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2027 dapat ditetapkan sebelum 31 Desember 2026. **Progres Saat Ini** : Tahap penyusunan Rancangan Akhir **RKPD 2027**.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga siklus anggaran yang transparan. Ketepatan waktu dalam penyusunan **APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2026** dan **APBD Induk Tahun 2027** bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan perwujudan dari tata kelola keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator : *Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)*

Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00

Rendahnya angka penyerapan sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya tantangan dalam percepatan pelaksanaan program kerja daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengoptimalkan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sisa anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Indikator : *Indeks Pengelolaan Aset*

Target dan realisasi Penyerapan belanja modal sampai dengan triwulan II Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp1.054.652.099.857,00 terealisasi sebesar Rp111.643.403.914,00 atau baru mencapai 10,59%.

Nilai Sementara Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025 dengan nilai yaitu 2,22 yang masih menggunakan kertas kerja Tahun 2024 dengan data tahun 2025. Sehingga penentuan hasil penilaian untuk Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 masih menunggu kertas kerja terbaru dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Selanjutnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2026 dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Sehingga Indeks Pengelolaan Aset (IPA) secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2027.

Sasaran 3 : Meningkatkan Tata Kelola OPD

Indikator : *Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah*

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sudah mencapai 50%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, BPKAD telah menyelesaikan penyusunan dan pengunggahan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Tahun 2025 per 31 Maret 2026. Langkah ini merupakan bagian dari siklus akuntabilitas untuk mengukur efektivitas program penunjang urusan pemerintahan daerah terhadap target Renstra 2025-2029.

Selain itu, sampai dengan triwulan II output yang telah dihasilkan seperti Buku Revisi RKAP Perkada, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan Triwulan II, Laporan Monev Perbidang Triwulan II, Laporan Perjanjian Kinerja Triwulan II, Laporan Pemantauan Kinerja Triwulan II dengan persentase capaian sebesar 50%. Progres berada di angka 50% karena aktivitas evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan secara berkala di setiap triwulan.

Berdasarkan **tabel 2.1** dibawah bahwa target dan realisasi indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan TA. 2025 pada Triwulan II

Tabel 2.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025
							Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 memang belum terbit, karena tahun anggaran 2026 saat ini masih berjalan dan baru akan diaudit serta diumumkan opininya oleh BPK pada pertengahan tahun 2027.
			a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	
			- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026				Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
			- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027				Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
			b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	%	5	-	Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	Indeks Pengelolaan Aset akan diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	Belum ada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Per Triwulan

Realisasi dan Capaian Kinerja atas Laporan Keuangan Hingga Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mempertahankan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) **Tahun Anggaran 2025**. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna XXXVI DPRD Provinsi Sumsel pada **15 Juni 2026**

Adapun target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2026 akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator :

1. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Realisasi dan Capaian kinerja pada indikator Penetapan dokumen APBD Induk TA 2027 adalah belum ada capaian, karena dokumen tersebut menurut hukum belum memasuki tahap penetapan. Berdasarkan siklus anggaran tahunan, dokumen APBD baru akan ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya (Desember 2026) untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan Capaian penetapan dokumen APBD Perubahan (APBD-P) 2026 juga secara formal belum ada capaian. Berdasarkan siklus anggaran yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, pembahasan APBD-P umumnya baru dimulai pada pertengahan tahun anggaran setelah laporan realisasi semester pertama (Januari-Juni) disampaikan.

2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga **30 Juni 2026**, kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
LRA Triwulan II Tahun 2026

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Target di Akhir Tahun (%)	Realisasi di Bulan ini (%)
Total Belanja	9.747.926.839.611	2.589.777.808.148,98	100	26,57%
Belanja Operasi	5.434.495.055.886,00	1.781.945.610.162,00	100	32,79%
Belanja Modal	1.054.652.099.857,00	111.643.403.914,00	100	10,59%
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	-	100	-
Belanja Transfer	3.248.779.683.868,00	696.188.794.072,98	100	21,43%

3. Indeks Pengelolaan Aset

Nilai Sementara Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025 dengan nilai yaitu 2,22 yang masih menggunakan kertas kerja Tahun 2024 dengan data tahun 2025. Sehingga penentuan hasil penilaian untuk Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 masih menunggu kertas kerja terbaru dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Selanjutnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2026 dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Sehingga Indeks Pengelolaan Aset (IPA) secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2027.

4. Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Capaian Nilai SAKIP BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 secara administrasi dengan progres mencapai 50% karena hasil penilaian SAKIP merupakan penilaian tahunan formal yang dikeluarkan oleh tim evaluator. Namun, sepanjang Triwulan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pemenuhan komponen SAKIP. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan penyelarasan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2026, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya sebagai akuntabilitas publik, Dokumen Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan per triwulan.

Berdasarkan tabel 2.3 dibawah akan disajikan realisasi kinerja serta capaian kinerja per triwulan

Tabel 2.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Per Triwulan

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025
								Untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 belum terbit, karena tahun anggaran 2026 saat ini masih berjalan dan baru akan diaudit serta diumumkan opininya oleh BPK pada pertengahan tahun 2027.
			a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	-	
			- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026					Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
			- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027					Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
			b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	%	5	-	-	Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	-	Nilai Indeks Pengelolaan Aset dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Adapun Indeks Pengelolaan Aset (IPA) BPKAD untuk Tahun Anggaran 2026 secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya (Tahun 2027).
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	-	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena proses evaluasi dan penilaiannya baru berjalan saat ini (pertengahan tahun 2026)

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029 dan regulasi terkait, target indikator Opini BPK adalah mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target ini selaras dengan Keputusan Gubernur Nomor 872/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Adapun perbandingan **realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis** akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target 100% ketepatan waktu penetapan APBD sepanjang periode 2025-2029 sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Komitmen ini memastikan seluruh dokumen anggaran disahkan paling lambat tanggal 31 Desember, guna menjamin kesinambungan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah tepat waktu sejak awal tahun anggaran. Capaian ini menjadi indikator utama tata kelola fiskal daerah dalam mendukung visi pembangunan Sumatera Selatan ke depan.

Target kinerja pada triwulan II belum ada realisasi ini sesuai dengan perencanaan dan aturan hukum. Berdasarkan regulasi, tidak ada jadwal penetapan Perda APBD Induk maupun Perubahan pada Triwulan II. Adapun kegiatan pada TW II Tahun 2026 :

- a) Fokus utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada TW II Tahun 2026 adalah mengawal pelaksanaan APBD Induk Tahun Anggaran 2026 yang sudah disahkan.
- b) Memulai persiapan administrasi untuk penyusunan Rencana Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)

Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja daerah yang efisien dan akuntabel, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan pengendalian **deviasi realisasi belanja terhadap total belanja APBD** sebagai indikator kinerja utama dalam Renstra 2025–2029.

Target akhir periode ini diarahkan pada pencapaian tingkat deviasi sebesar **5%**, yang mencerminkan tingkat perencanaan yang optimal antara arus kas dengan pelaksanaan program kegiatan.

Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00

3. Indeks Pengelolaan Aset

Dalam upaya mewujudkan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang profesional dan berstandar nasional, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan capaian **Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 2,22%** sampai dengan tahun 2029. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk beralih dari penatausahaan administratif menuju manajemen aset yang memberikan nilai tambah (aset produktif).

Nilai Sementara Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025 dengan nilai yaitu 2,22 yang masih menggunakan kertas kerja Tahun 2024 dengan data tahun 2025. Sehingga penentuan hasil penilaian untuk Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 masih menunggu kertas kerja terbaru dari Kementerian Dalam Negeri RI. Selanjutnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2026 dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Sehingga Indeks Pengelolaan Aset (IPA) secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2027.

4. Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Melalui mekanisme *cascading* yang tepat dalam Renstra 2025-2029, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi dan memangkas kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan pada program prioritas.

Berdasarkan tabel 2.4 menunjukkan perbandingan capaian kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang dibandingkan dengan target akhir renstra.

Tabel 2.4

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025
										Untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 belum terbit, karena tahun anggaran 2026 saat ini masih berjalan dan baru akan diaudit serta diumumkan opininya oleh BPK pada pertengahan tahun 2027.
			a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	-	100	-	
			- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026							Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
			- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027							Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
			b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	%	5	-	-	5	-	Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	-	2,22	-	Nilai Indeks Pengelolaan Aset dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Adapun Indeks Pengelolaan Aset (IPA) BPKAD untuk Tahun Anggaran 2026 secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya (Tahun 2027).
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	-	91	-	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena proses evaluasi dan penilaiannya baru berjalan saat ini (pertengahan tahun 2026)

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pencapaian Opini WTP dan peningkatan kinerja keuangan diraih karena komitmen pimpinan dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI). Faktor pendukung utama meliputi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara tepat waktu, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Faktor-faktor utama yang melandasi keberhasilan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada TA 2025 meliputi :

a) Pemenuhan 4 Kriteria Utama BPK

- Kesesuaian dengan SAP
- Kecukupan Pengungkapan
- Kepatuhan Peraturan
- Efektivitas SPI

b) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib

Adanya rekonsiliasi aset secara berkala, inventarisasi barang, serta memperjelas status hukum/sertifikasi tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

c) Komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntansi untuk menyerahkan laporan transaksi secara cepat, tepat waktu, dan akurat sebelum dikonsolidasikan.

d) Optimalisasi Sistem Digital (SIPD RI)

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) membantu mengunci integrasi data mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan sehingga meminimalkan celah kesalahan input manual.

e) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat menunjukkan komitmen tinggi dengan segera menyelesaikan temuan atau rekomendasi hasil pemeriksaan (LHP) tahun sebelumnya.

2. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Sesuai dengan ketentuan regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, jadwal penetapan Perda APBD tidak dilakukan pada Triwulan II.

Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya ditentukan oleh :

- a) Komitmen dan keselarasan hubungan antara Kepala Daerah beserta jajarannya (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif).
 - b) Kerja sama yang harmonis dan komunikasi politik yang sehat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD membuat proses pembahasan berjalan lancar tanpa adanya konflik kepentingan yang berkepanjangan.
 - c) Kedisiplinan dalam mematuhi tahapan siklus anggaran memegang peranan krusial. Keberhasilan ini diawali dengan ketepatan waktu penyusunan dokumen awal, seperti Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang didukung oleh penerbitan pedoman resmi dari Pemerintah Pusat secara berkala. Kepatuhan ini juga didorong oleh kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia di daerah yang memahami aturan penganggaran dengan baik.
 - d) Ancaman sanksi tegas dari pemerintah pusat seperti penundaan penyaluran dana transfer atau pemotongan hak keuangan bagi daerah yang terlambat menjadi motivasi kuat bagi seluruh pihak untuk merampungkan pembahasan anggaran sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution).

Keberhasilan dalam indikator ini ditunjukkan oleh **nilai deviasi yang semakin kecil (mendekati 0%)** yang berarti realisasi belanja sangat konsisten dengan perencanaan awal dalam APBD.

Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00

Solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Setiap OPD melakukan evaluasi setiap minggu terhadap Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa serta memudahkan pelaksanaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- c. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik, yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4. Indeks Pengelolaan Aset

Nilai Sementara Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025 dengan nilai yaitu 2,22 yang masih menggunakan kertas kerja Tahun 2024 dengan data tahun 2025. Sehingga penentuan hasil penilaian untuk Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 masih menunggu kertas kerja terbaru dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Selanjutnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2026 dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Sehingga Indeks Pengelolaan Aset (IPA) secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2027.

Untuk mencapai nilai IPA yang tinggi, BPKAD harus fokus pada transformasi digital. Mengoptimalkan penggunaan SIPD RI. Hal ini memastikan seluruh data keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) tercatat secara real-time dan minim risiko salah saji. Selain itu, BPKAD perlu bergerak bersama BPN untuk mempercepat sertifikasi hukum seluruh aset tanah milik pemerintah daerah demi mencegah sengketa. Tata kelola ini diperkuat dengan kedisiplinan tinggi dalam menyerahkan dokumen anggaran secara tepat waktu sesuai jadwal Kemendagri, yang dibarengi dengan agenda rekonsiliasi berkala antar-OPD setiap triwulan.

5. Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Capaian Nilai SAKIP BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 secara administrasi dengan progres mencapai 50% karena hasil penilaian SAKIP merupakan penilaian tahunan formal yang dikeluarkan oleh tim evaluator. Namun, sepanjang Triwulan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pemenuhan komponen SAKIP. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan penyelarasan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2026, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya sebagai akuntabilitas publik, Dokumen Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan per triwulan.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPKAD, fokus utama harus digeser dari sekadar penyerapan anggaran menjadi pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja nyata. Setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD harus memiliki tolok ukur output dan outcome yang jelas, sehingga anggaran tidak habis untuk kegiatan rutin yang tidak berdampak, melainkan benar-benar menyasar pada target efisiensi fiskal dan pemanfaatan aset daerah.

Tabel 2.5 dibawah menunjukkan Analisis keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan.

Tabel 2.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2026			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Faktor Keberhasilan : 1 Pemenuhan 4 Kriteria Utama BPK yaitu Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan Peraturan dan Efektivitas SPI 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib 3 Komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku entitas akuntansi untuk menyerahkan laporan transaksi secara cepat, tepat waktu, dan akurat sebelum dikonsolidasikan 4 Optimalisasi Sistem Digital (SIPD RI) 5 Kecepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	
			Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	-	-	- Target kinerja pada triwulan II belum ada realisasi ini sesuai dengan perencanaan dan aturan hukum. Berdasarkan regulasi, tidak ada jadwal penetapan Perda APBD Induk maupun Perubahan pada Triwulan II	
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	5%	-	-	- Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00	
								- Menyusun lini masa (<i>timeline</i>) persiapan dokumen agar tahapan penting pada Triwulan III tidak mengalami keterlambatan. - Setiap OPD melakukan evaluasi setiap minggu terhadap Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan. - Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa serta memudahkan pelaksanaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. - Kepala SKPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik, yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2026			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,18%	-	-	- Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan output yang telah dihasilkan yaitu Kerjasama dengan Kejati Sumsel (dalam hal pengamanan aset), BPN Kota Palembang (dalam hal percepatan sertipikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), DJKN (dalam hal Penilaian BMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), dan SK Gubernur yang telah terbit diantaranya terkait Hibah, Sewa Menyewa, Pinjam Pakai, SK Gubernur Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang BMD dan Penghapusan BMD.	- Menjalin kerja sama dengan Kejati Sumsel sebagai solusi penanganan sengketa dan pengamanan aset secara yuridis. - Menggandeng BPN Kota Palembang sebagai langkah cepat mengatasi lambatnya sertifikasi tanah Pemprov Sumsel. - Berkolaborasi dengan DJKN untuk melakukan penilaian kembali BMD guna menyajikan nilai aset yang valid pada neraca.
		3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	- Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	91%			- Berdasarkan data sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah mempublikasikan dokumen perencanaan dan pemantauan awal tahun, termasuk DPA Induk TA 2026 per 13 Januari 2026 dan LKJiP BPKAD Tahun 2025 per 31 Maret 2026.	- Penguatan Pemantauan Triwulanan: Melaksanakan evaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) secara berkala setiap triwulan untuk mendeteksi deviasi target sejak dini. - Memastikan seluruh sasaran strategis dari tingkat kepala badan hingga staf selaras dan terdokumentasi dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Data : Rencana Strategis BPKAD TA 2025-2029, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan II Tahun 2026

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian Kinerja yang lebih baik.

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan perhitungan yaitu 100% dikurangi (Realisasi Anggaran dibagi Pagu Anggaran) $\times 100\%$ (sesuai dengan Buku Panduan SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada Tabel **2.6** (Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran) bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan **Tabel 2.7** (Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan) diatas, bahwa sampai dengan akhir Semester II tahun 2026 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai 78,37%.

Kegiatan pada triwulan pertama masih didominasi oleh pengeluaran rutin, seperti pembayaran gaji pegawai, serta tagihan operasional kantor (air dan listrik). Dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat maka BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan efisiensi dan menyusun ulang dokumen anggaran. Hal ini menyebabkan penundaan pada sejumlah proyek fisik yang direncanakan sejak awal tahun. Meski terdapat langkah-langkah efisiensi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa program prioritas dan layanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan yang signifikan.

Tabel 2.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=100-10
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP				
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	-	-	5.420.648.668,00	1.210.369.243,00	22,33	77,67
			Deviasi realisasi belanja terhadap - belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	5%	-	-	1.625.000.000,00	141.415.240,00	8,70	91,30
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	-	-	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	75,27
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	91%	-	-	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	69,60
		Rata-Rata Capaian Kinerja					10.898.620.668,00	2.357.599.776,00	21,63	78,37

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Efisiensi
							Target	Realisasi	Capaian		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN KEUANGAN													
I	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (91%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	45,96	50,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	69,60
				i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	50,00	50,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	69,60
				1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, LKJIP, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, Buku DPA, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Renaksi	22	11	50,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	69,60
II		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan (100%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	%	100	27,59	32,32	7.045.648.668,00	1.351.784.483,00	19,19	80,81
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	25,95%	26,14%					
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60%	27,52%					
					Persentase Penurunan SILPA	%	2,50%	-					
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	100%					

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	100	24,04	24,04	5.420.648.668,00	1.210.369.243,00	22,33	77,67
				2	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	4	-	18,60	522.000.000,00	93.373.317,00	17,89	82,11
				3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub,'Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	34	8	23,53	1.495.648.668,00	256.808.490,00	17,17	82,83
				4	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	-	30,00	3.403.000.000,00	860.187.436,00	25,28	74,72
				ii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	100	14,00	14,00	770.000.000,00	11.295.940,00	1,47	98,53

Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian		(Rp)	(%)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID,TDF)	44	18	40,91	420.000.000,00	5.184.100,00	1,23	98,77
		6 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	179	90	50,00	350.000.000,00	6.111.840,00	1,75	98,25
		iii Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	%	100	58,93	58,93	855.000.000,00	130.119.300,00	15,22	84,78
		7 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	17	4	25,00	390.000.000,00	52.958.450,00	13,58	86,42
		8 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda dan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	14	13	92,86	465.000.000,00	77.160.850,00	16,59	83,41
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (2,18%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	65,23	65,23	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	75,27

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6%	3%						
					Asset Management	%	Ya	Ya						
				i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	65,23	65,23	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	75,27
				9	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	4	1	50,00	430.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				10	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan	61	40	65,57	485.000.000,00	313.399.730,00	64,62	35,38
				11	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penertiban BMD bermasalah, RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)	76	56	73,68	1.250.500.000,00	328.631.381,00	26,28	73,72
				12	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	60	43	71,67	753.500.000,00	79.859.702,00	10,60	89,40
										10.898.620.668,00	2.357.599.776,00	21,63	78,37	

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dalam Pencapaian Target Perjanjian Kinerja yaitu mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dengan total anggaran sebesar Rp5.420.648.668,00 dengan realisasi sebesar Rp1.210.369.243,00 atau 22,33% dengan capaian Fisik sebesar 24,04% yang didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dianggarkan sebesar Rp522.000.000,00 terealisasi sebesar Rp93.373.317,00 atau 17,89% dengan capaian fisik sebesar 18,60%.

Sub Kegiatan tersebut merupakan Fondasi awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang krusial untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dokumen ini memastikan perencanaan anggaran selaras dengan aturan, realistis, dan transparan. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada RPJMD. Proses koordinasi yang baik memastikan tidak ada program fiktif atau kegiatan yang tidak didukung dokumen perencanaan. PPAS memberikan batas maksimal anggaran untuk setiap kegiatan, mencegah pemborosan atau penganggaran yang tidak terukur yang sering menjadi temuan BPK.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp1.495.648.668,00 terealisasi sebesar Rp256.808.490,00 atau 17,17% dengan capaian fisik sebesar 23,53%.

Sub Kegiatan tersebut merupakan hal utama dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika Perda APBD dan Perkada Penjabaran ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember), hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang disiplin. Bahwa Proses pembahasan Rancangan Perda (Raperda) bersama DPRD dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri memastikan anggaran memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dokumen yang telah ditetapkan ini menjadi acuan bagi auditor BPK dalam memverifikasi setiap realisasi belanja pemerintah daerah.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dianggarkan sebesar Rp3.403.000.000,00 terealisasi sebesar Rp860.187.436,00 atau 25,28% dengan capaian fisik sebesar 30%.

Sub Kegiatan ini fondasi hukum (regulasi) yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah memiliki standar yang baku dan sesuai dengan aturan terbaru. BPK akan memberikan opini tidak baik jika daerah masih menggunakan acuan hukum yang sudah kadaluwarsa, karena hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan.

2. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp770.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.295.940,00 atau 1,47% dengan capaian fisik sebesar 45,59% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp420.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.184.100,00 realisasi atau 1,23% dengan capaian fisik sebesar 18%.

Sebagai bendahara umum daerah, BPKAD memverifikasi bahwa setiap pengeluaran kas (penerbitan SP2D) didasarkan pada dokumen pendukung yang lengkap dan sah, serta untuk memastikan bahwa Kas di Kas Daerah yang disajikan dalam Neraca adalah nyata (*existence*), akurat nilainya (*accuracy*), dan dimiliki secara sah (*rights*) oleh pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Melalui pengelolaan kas yang tertib, membuktikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menyajikan posisi kas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memenuhi kriteria kesesuaian SAP dan efektivitas SPI untuk meraih WTP.

- b) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.111.840,00 atau 1,75% dengan capaian fisik sebesar 10%.

Sub-kegiatan ini merupakan salah satu prosedur pengendalian intern (SPI) paling penting di BPKAD Prov. Sumsel untuk memastikan laporan keuangan daerah bebas dari salah saji material. Opini WTP sangat bergantung pada kekuatan SPI. Dengan adanya rekonsiliasi, semakin kecil risiko kecurangan (*fraud*) atau kehilangan uang daerah yang tidak terdeteksi.

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp855.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp130.119.300,00 atau 15,22% dengan capaian fisik sebesar 58,93% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dianggarkan sebesar Rp390.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.958.450,00 atau 13,58% dengan capaian fisik sebesar 25%.

Dalam audit BPK, Sub kegiatan ini adalah penentu utama apakah laporan keuangan layak menyandang opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sub kegiatan ini juga untuk menghindari ketidaksinkronan data antar-laporan yang sering menjadi temuan audit. Rekonsiliasi memastikan seluruh laporan menyajikan angka yang logis dan saling terhubung. BPK memerlukan penjelasan memadai atas setiap kenaikan atau penurunan akun yang signifikan. Verifikasi yang kuat memberikan data yang valid untuk narasi di CaLK.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dianggarkan sebesar Rp465.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp77.160.850,00 atau 16,59% dengan capaian fisik sebesar 92,86%.

Dalam siklus akuntansi daerah, sub-kegiatan ini merupakan akhir dari seluruh proses pelaporan keuangan dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan penyusunan Raperda Pertanggungjawaban ini adalah penentu apakah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan BPK dapat dipertahankan. Sub kegiatan ini adalah proses formalisasi hukum atas laporan keuangan yang telah diaudit. Jika BPKAD mampu menyusun draf regulasi ini dengan akurat, tepat waktu, dan selaras dengan hasil audit BPK, maka opini WTP akan terjaga secara administratif dan hukum.

c) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp2.919.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp721.890.813,00 atau 24,73% dengan capaian fisik sebesar 65,23% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00 belum ada realisasi atau 0% dengan capaian fisik sebesar 50%.

Sub kegiatan ini memiliki peran krusial sebagai alat **pengendalian biaya** yang mencegah terjadinya pemborosan atau penggelembungan harga (*mark-up*). Selain itu, guna memastikan setiap belanja memiliki "patokan harga" yang sah, sehingga laporan keuangan di akhir tahun dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

- b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp485.000.000,00 terealisasi sebesar Rp313.399.730,00 atau 64,62% dengan capaian fisik sebesar 65,57%.

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam audit BPK, penatausahaan yang tertib adalah syarat mutlak untuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena aset tetap seringkali menjadi akun dengan nilai material terbesar di Neraca.

- c) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp1.250.500.000,00 terealisasi sebesar Rp328.631.381,00 atau 26,28% dengan capaian fisik sebesar 73,68%.

Sub Kegiatan ini untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola sesuai aturan dan fisik asetnya benar-benar ada, memastikan OPD disiplin dalam melakukan rekonsiliasi internal antara kartu barang (KIB) dengan catatan akuntansi. Selain itu, memastikan bahwa aset tetap yang biasanya merupakan akun bernilai terbesar di Neraca dikelola dengan transparan, akuntabel, dan patuh hukum. Jika pengawasan lemah, aset menjadi titik yang paling mudah tidak memperoleh opini WTP.

- d) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp753.500.000,00 terealisasi sebesar Rp79.859.702,00 atau 10,60% dengan capaian fisik sebesar 71,67%.

Sub kegiatan ini memastikan bahwa siklus aset (dari penggunaan hingga penghapusan) terdokumentasi secara hukum dan akuntansi. Hal ini menjamin prinsip Penyajian Wajar di Neraca dan Laporan Operasional, sehingga opini WTP dapat dipertahankan.

Tabel 2.8 menunjukkan Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dalam Pencapaian Target Perjanjian Kinerja yaitu mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	
									(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN KEUANGAN												
I	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (91%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	50,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	
				i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	%	50,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	
				1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, LKJIP, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, Buku DPA, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Renaksi	50,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	Menunjang
II		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan (100%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	%	42,81	7.045.648.668,00	1.351.784.483,00	19,19	
						Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%					
						Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%					
						Persentase Penurunan SILPA	%					
						Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%					

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	
									(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	
				i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	24,04	5.420.648.668,00	1.210.369.243,00	22,33	
				2	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	18,60	522.000.000,00	93.373.317,00	17,89	Menunjang
				3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub,'Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	23,53	1.495.648.668,00	256.808.490,00	17,17	Menunjang
				4	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	30,00	3.403.000.000,00	860.187.436,00	25,28	Menunjang
				ii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	45,45	770.000.000,00	11.295.940,00	1,47	

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
									(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID, TDF)	40,91	420.000.000,00	5.184.100,00	1,23	Menunjang
				6 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKKPD)	50,00	350.000.000,00	6.111.840,00	1,75	Menunjang
				<i>iii</i> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	%	58,93	855.000.000,00	130.119.300,00	15,22	
				7 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	25,00	390.000.000,00	52.958.450,00	13,58	Menunjang
				8 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda dan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	92,86	465.000.000,00	77.160.850,00	16,59	Menunjang
III		3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (2,18%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	65,23	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
									(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%					
					Asset Management	%					
			i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	65,23	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	
				9 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	50,00	430.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
				10 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan	65,57	485.000.000,00	313.399.730,00	64,62	Menunjang
				11 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penertiban BMD bermasalah, RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)	73,68	1.250.500.000,00	328.631.381,00	26,28	Menunjang
				12 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	71,67	753.500.000,00	79.859.702,00	10,60	Menunjang
								10.898.620.668,00	2.357.599.776,00	21,63	

5. Realisasi Keuangan

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 900.1.12/035/BPKAD/2026 perihal Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas pada APBD tanggal 28 April 2026, total pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 semula sebesar **Rp3.435.440.907.622,00** berkurang sebesar **Rp70.777.938.350,00** menjadi **Rp3.364.662.969.272,00** yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi : Rp 91.468.285.404,00
- b. Belanja Modal : Rp 14.415.000.000,00
- c. Belanja Tidak Terduga : Rp 10.000.000.000,00
- d. Belanja Transfer : Rp 3.248.779.683.868,00

Perbandingan antara realisasi (keuangan dan fisik) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA.

a. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp17.873.555.858,00,00 atau 19,54%.

b. Realisasi Belanja Modal

- 1. Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.292.640,00 atau 0,05%.

2. Realisasi Keuangan

- a) Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0-65% : 39 sub kegiatan
- b) Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 0 sub kegiatan
- c) Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 91-100% : 1 sub kegiatan

3. Realisasi fisik

- a) Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0-65% : 33 Sub Kegiatan
- b) Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 5 Sub Kegiatan
- c) Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 91-100% : 2 Sub Kegiatan

4. Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Keuangan Belanja Tidak Terduga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 belum ada realisasi atau 0%.

5. Realisasi Belanja Transfer

Realisasi Keuangan Belanja Transfer Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp696.188.794.072,98 atau 21,43%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah pada **Tabel 2.9** sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Realisasi i Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
									(Rp)	(%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN KEUANGAN											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	45,96	127.641.223.754,00	94.712.636.736,00	15.667.183.018,00	16,54	45,96
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	50,00	903.972.000,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	50,00
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	%	100	57,92	64.039.604.404,00	63.303.964.404,00	10.817.126.370,00	17,09	57,92
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100,00	270.000.000,00	140.000.000,00	132.483.887,00	94,63	100,00
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	26,43	350.000.000,00	405.101.158,00	68.448.550,00	16,90	26,43
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	%	100	44,21	5.412.000.000,00	6.947.000.000,00	1.967.441.760,00	28,32	44,21
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	%	100	0,00	39.007.048.176,00	13.500.000.000,00	-	0,00	0,00
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	%	100	47,22	4.579.079.174,00	4.367.079.174,00	1.129.750.326,00	25,87	47,22
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	%	100	41,92	13.079.520.000,00	5.115.520.000,00	1.268.007.645,00	24,79	41,92

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
								(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan	%	100	33,91	3.305.340.683.868,00	3.267.031.332.536,00	697.680.568.739,98	21,36	33,91
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	25,95%	26,14%					
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60%	27,52%					
		Persentase Penurunan SILPA	%	2,50%	-					
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	100%					
i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	100	24,04	4.070.000.000,00	5.420.648.668,00	1.210.369.243,00	22,33	24,04
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	%	100	14,00	1.036.000.000,00	1.206.000.000,00	139.990.184,00	11,61	14,00
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	100	45,59	670.000.000,00	770.000.000,00	11.295.940,00	1,47	45,59
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	%	100	58,93	785.000.000,00	855.000.000,00	130.119.300,00	15,22	58,93

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
									(Rp)	(%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	%	100	26,96	3.298.779.683.868,00	3.258.779.683.868,00	696.188.794.072,98	21,36	26,96
III		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	65,23	2.459.000.000,00	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	65,23
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6%	3%					
			Asset Management	%	Ya	Ya					
	i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	65,23	2.459.000.000,00	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	65,23
Jumlah : 40 sub kegiatan							3.435.440.907.622,00	3.364.662.969.272,00	714.069.642.570,98	21,22	48,37

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan II TA.2026

6. Upaya Perbaikan terkait Perjanjian Kinerja pada masa yang akan datang

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Upaya perbaikan untuk memastikan Penetapan Dokumen APBD Tepat Waktu (sebelum 31 Desember) sangat penting dalam mempertahankan opini WTP, karena keterlambatan sering dianggap sebagai kelemahan serius dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI). Upaya perbaikan tersebut meliputi :

1. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) untuk mengunci jadwal (tahapan) secara otomatis.

Memastikan seluruh data input dari SKPD dilakukan sebelum batas waktu sistem ditutup (*deadline locking system*) yang bertujuan menghindari penundaan akibat proses input manual atau perubahan anggaran di luar jadwal yang telah disepakati.

2. Penguatan Fungsi TAPD dalam *Time Management*

Menyusun Kalender Anggaran yang menetapkan target penyampaian KUA-PPAS dan Raperda APBD kepada DPRD yang bertujuan memberikan ruang waktu untuk proses pembahasan dengan DPRD dan evaluasi oleh Kemendagri.

3. Komunikasi Intensif dan Pra Pembahasan dengan DPRD

Melakukan Pra-pembahasan informal atau konsultasi rutin dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum dokumen resmi diserahkan yang bertujuan menyelaraskan persepsi terkait program prioritas dan kemampuan fiskal daerah sehingga meminimalisir perdebatan yang berkepanjangan saat sidang resmi.

4. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Proses evaluasi oleh Kemendagri sering memakan waktu jika banyak catatan oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak guna percepatan tindak lanjut hasil evaluasi sehingga penetapan Perda APBD tidak terhambat oleh hambatan administratif pasca evaluasi.

b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)

Upaya perbaikan deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) oleh BPKAD, yang sangat penting untuk pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, berfokus pada percepatan penyerapan anggaran secara konsisten sepanjang tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun (akhir tahun anggaran) dan mengurangi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Berikut adalah langkah-langkah perbaikan strategis guna mempertahankan WTP untuk memastikan deviasi belanja tetap rendah melalui:

1. Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran dengan mendorong OPD menyusun Anggaran Kas yang mencerminkan jadwal riil pelaksanaan kegiatan untuk memperkecil selisih (*deviasi*) antara rencana dan realisasi.
2. Memastikan perencanaan belanja barang dan belanja modal sesuai dengan target penyerapan, terutama untuk kegiatan fisik yang berisiko lelang terlambat.
3. Penggunaan e-katalog untuk mempercepat pengadaan barang/jasa tanpa tender, sehingga mempercepat serapan anggaran.
4. Mengadakan rekonsiliasi data belanja antara BPKAD dan OPD secara rutin untuk memastikan akurasi data penyerapan.

Dengan memperkecil deviasi, pemerintah daerah menunjukkan perencanaan yang baik, yang merupakan salah satu poin dalam penilaian WTP.

c. Indeks Pengelolaan Aset

Upaya perbaikan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK difokuskan pada peningkatan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih tertib administrasi, fisik, dan hukum. Berikut adalah beberapa upaya perbaikan pengelolaan aset untuk mendukung WTP :

1. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset (inventarisasi) secara berkala dan akurat untuk memastikan seluruh aset tercatat dalam laporan keuangan.
2. Memastikan nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai yang akurat.
3. Mengamankan aset fisik melalui sertifikasi tanah dan pengamanan hukum aset lainnya untuk menghindari sengketa yang dapat mempengaruhi opini WTP.
4. Menggunakan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mendokumentasikan mutasi aset, hibah, dan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.
5. Memaksimalkan penggunaan aset tetap agar memberikan nilai tambah dan meminimalisir *idle asset*.
6. Menerapkan metode penyusutan (metode garis lurus) secara tepat untuk mencerminkan penurunan nilai manfaat aset dalam laporan keuangan.
7. Melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan pendampingan tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan aset.

BAB III

PENUTUP

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama seluruh jajaran OPD dalam menyusun LKPD TA 2025 yang akuntabel berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kali berturut-turut. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Meskipun tantangan fiskal pada Triwulan II Tahun 2026 cukup signifikan akibat penyesuaian dana transfer, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tetap menempatkan tata kelola keuangan yang akuntabel sebagai prioritas utama. Seluruh langkah penyerapan anggaran yang telah direncanakan tetap berjalan prinsip transparansi demi menjaga kesinambungan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih berturut-turut.

Kinerja organisasi pada Triwulan II ini menjadi dasar evaluasi penting untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen dalam menjaga pengelolaan APBD yang tepat waktu, mulai dari tahap penatausahaan hingga pelaporan.
- b. Meskipun secara nominal angka serapan baru mencapai 26,57%. Adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyesuaian anggaran. Karena adanya perubahan postur anggaran akibat kebijakan pusat, dokumen anggaran harus dibahas kembali bersama pihak legislatif, yang secara otomatis menghambat pelaksanaan program di lapangan.
- c. Secara keseluruhan, pengelolaan aset pada Triwulan I tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Fokus pada Triwulan II adalah meningkatkan efisiensi penggunaan aset untuk mendorong capaian kinerja organisasi yang lebih baik

Demikian Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi selama periode Januari hingga Maret 2026. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai landasan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Palembang, 6 Juli 2026



Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	